

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan terkait pengangguran pada akhirnya selalu menjadi masalah utama di Indonesia, berbicara perihal pengangguran tentu selain masalah sosial pastinya terkait masalah ekonomi, lebih luas dari itu yakni adanya kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, tingkat pendidikan yang rendah dan tidak memiliki keterampilan, seseorang yang minim pendidikan cenderung susah untuk memperoleh pekerjaan, hal ini karena dituntut untuk memiliki keterampilan khusus.

Pada skripsi ini, peneliti memilih kawasan Cikarang untuk dijadikan lokasi penelitian, hal ini didasari karena Cikarang sendiri merupakan kawasan industri di Kabupaten Bekasi yang secara keseluruhan memiliki 23 kecamatan, dan lima diantaranya adalah kawasan Cikarang yakni Kec. Cikarang Selatan, Kec. Cikarang Barat, Kec. Cikarang Utara, Kec. Cikarang Timur dan Cikarang Pusat.

Mengutip infobekasi.co Kabupaten Bekasi salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki kawasan industri. Kabupaten Bekasi memiliki sepuluh kawasan industri yang terbangun dengan luas lahan kawasan mencapai 9.496 Ha. Kesepuluh kawasan industri tersebut yaitu:

1. Kawasan Industri Jababeka dengan luas lahan 2.267 Ha.
2. MM2100 Industrial Town BFIE dengan luas lahan 1.700 Ha.

3. GreenLand International Industrial Center (GIIC) dengan luas lahan 1.700 Ha.
4. Kawasan Industri Lippo Cikarang dengan luas lahan 1.645 Ha.
5. MM2100 Industrial Town MMID dengan luas lahan 805 Ha.
6. Kawasan Marunda Center dengan luas lahan 600 Ha.
7. East Jakarta Industrial Park dengan luas lahan 320 Ha.
8. Kawasan Industri Terpadu Indonesia China dengan luas lahan 205Ha
9. Bekasi International Industrial Estate dengan luas lahan 200 Ha
10. Kawasan Industri Gobel dengan luas lahan 54 Ha

Berbicara perihal pekerjaan dan konteks pengangguran, kawasan Cikarang yang notabene dilabeli sebagai kawasan Industri terbesar di Asia Tenggara, faktanya belum mampu menyerap karyawan lokal disana, hal ini disebabkan salah beberapa faktor, yakni banyaknya masyarakat luar Kabupaten Bekasi yang berbondong-bondong mencari pekerjaan di kawasan Cikarang.

Pada kenyataannya, kawasan Cikarang memang menjadi tempat pelabuhan para angkatan kerja baru atau yang lama sebagai tujuan perjalanan karir kedepannya, pasalnya memiliki nilai Upah Minimum Rata-rata, yakni sebesar Rp5.219.263 yang menjadikannya UMR tertinggi ke tiga di Indonesia. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan orang-orang berlomba untuk mendapatkan pekerjaan di kawasan Cikarang. Melihat situasi ini tentunya menyebabkan daya saing antara karyawan lokal dengan luar daerah, sehingga semua saling berebut untuk memperoleh pekerjaan yang layak disana.

Meski pun pada akhirnya pabrik-pabrik berdiri kokoh di kawasan Cikarang, tapi pada kenyataannya menjadi pertanyaan besar terkait penyebab perusahaan-perusahaan besar serta perusahaan lainnya tidak mampu menyerap masyarakat lokal di kawasan Cikarang, atau pun terkait solusi-solusi pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menyelesaikan masalah pengangguran ini.

Pada penelitian ini peneliti akan lebih memfokuskan pada kawasan Cikarang, yang notabene menjadi salah satu daerah yang memiliki perkembangan pesat, baik secara industri dan pertumbuhan penduduknya. Disamping itu pemerintah Kabupaten Bekasi nampaknya tak tinggal diam, Pemkab tengah gencar menyerukan program Pengentasan Pengangguran sebagai bentuk respon atas masih tingginya tingkat angka pengangguran di Kabupaten Bekasi, khususnya kawasan Cikarang.

Masalah Pengangguran memang bukan perkara mudah dan singkat untuk dihadapi, kebijaksanaan dan kecemerlangan tindakan pemerintah disoroti disini, karena dalam proses penyelesaiannya, pemerintah harus mengikutsertakan peran pendidikan karena berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten. Semakin banyaknya sumber daya manusia yang kompeten maka permintaan pasar kerja akan terjawab sesuai kompetensi yang diperlukan dan dimiliki oleh masyarakat. Tentu hal ini akan mampu mengurangi angka pengangguran.

Selain itu keterbatasan lapangan kerja yang tersedia belum sesuai dengan pertumbuhan tenaga kerja, terlebih lagi pemulihan ekonomi pasca pandemi yang masih berlangsung serta di era sekarang ini, semakin canggihnya teknologi seperti

AI (*Artificial Intelligence*), nampaknya disisi lain mampu menyebabkan polemik baru di dunia pekerjaan kawasan Cikarang. Lebih luas lagi dengan adanya pasar global, perusahaan asing lebih memilih pekerja dari negara asalnya.

Mengutip ANTARA News yang ditulis Pradita Kurniawan, Dani Ramdan dalam pernyataannya menjelaskan Kabupaten Bekasi menjadi daerah kawasan industri besar dengan lebih dari 7.000 pabrik beroperasi, namun besar kawasan industri tidak membuat persoalan pengangguran teratasi, justru angka pengangguran terus meningkat dengan mencapai lebih dari seratus ribu jiwa.

Berbicara tentang pekerjaan, tentunya tidak sesederhana kita mengharapkan pekerjaan yang diinginkan, hadirnya beragam kualifikasi pekerjaan menjadi suatu jalan bagi masyarakat yang dirasa memenuhi spesifikasi tersebut, dan di sisi lain kualifikasi itu bisa menjadi hambatan besar bagi masyarakat yang dirasa tidak memenuhi atau tidak memiliki kompetensi tersebut.

Senada dengan apa yang dituturkan Pj Bupati. Dani Ramdan usai pimpin Rapat Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Pengangguran Daerah (TKP3D) di Gedung Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, tahun 2023. Beliau mengatakan bahwasannya tenaga kerja lokal memiliki kekurangan pada aspek kompetensi dan karakter, mendasar pada kondisi ini peneliti melihat kurangnya strategi atau program yang memberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi masyarakat lokal. Lantas dari hal itulah pada akhirnya pemerintah daerah mulai meningkatkan anggaran pelatihan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Bekasi.

Pada kasus lain penyebab masalah pengangguran di kawasan Cikarang seperti yang peneliti sebut di awal yakni disebabkan oleh gelombang pencari kerja

dari luar daerah yang terus berdatangan, kondisi ini dituturkan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Edi Rohyadi pada liputan6.com

Realitas masalah inilah yang pada kenyataannya menjadi tugas penting bagi pemerintah daerah untuk terus selalu melakukan peningkatan kualitas mutu sumber daya manusia masyarakat kawasan Cikarang kedepannya, ditambah lagi dengan hadirnya tenaga kerja luar Indonesia yang kondisi tersebut sudah tak asing lagi terjadi di konteks pasar global di Indonesia.

Berdasarkan hasil data Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) Tahun 2023 Kabupaten Bekasi, Angka Pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bekasi pada tahun 2022 mencapai 10,31 persen dan TPT tahun 2023 menjadi sebesar 8,87 persen. Penurunan angka pengangguran di Kabupaten Bekasi dikarenakan perekonomian di Kabupaten Bekasi mengalami peningkatan. Pemerintah Kabupaten Bekasi berupaya untuk menangani pandemic Covid 19 aktivitas perekonomian dapat berjalan kembali.

Selanjutnya, berdasarkan hasil data Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) Tahun 2023 Kabupaten Bekasi Pada tahun 2022, perekonomian mulai membaik akibat dampak pandemi Covid19 pada tahun 2020-2021 yang menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran di Kabupaten Bekasi. Jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2023 mencapai 141.257 orang, berkurang sekitar 55.890 orang jika dibandingkan keadaan tahun 2022 (197.147 orang).

Pada konteks lain, jika dilihat dari angka usia produktif kerja di Indonesia umumnya, berdasarkan hasil surey Badan Pusat Statistik (BPS) Usia 45-49 tahun berhasil mendominasi angkatan kerja Indonesia 2023. Angkatan kerja sendiri

merupakan mereka yang berusia produktif dan aktif mencari pekerjaan atau sudah bekerja. Keberadaan mereka dinilai mampu memberikan kontribusi positif dalam perekonomian.

Melihat kondisi diatas, menunjukan bahwa semakin besar jumlah orang yang mencari pekerjaan tidak dapat dipungkiri akan menyebabkan masalah ketenagakerjaan, khususnya permasalahan penyediaan lapangan pekerjaan yang belum memadai atau belum mampu menyerap tenaga lokal masyarakat sekitar. Pertambahan angkatan kerja yang tidak selalu diikuti dengan pertambahan kesempatan kerja merupakan salah satu penyebab tingginya pengangguran, dan seiring meningkatnya jumlah pengangguran tentu akan berimplikasi pada tingkat kemiskinan masyarakat itu sendiri.

Tentunya ini menjadi masalah yang harus disolusikan bersama, khususnya bagi pemerintah sebagai pionir kebijakan-kebijakan yang mampu menjawab permasalahan pembangunan ekonomi nasional ini. Karena yang harus digaris bawahi adalah angkatan kerja merupakan sumber daya manusia terpenting dalam keberhasilan pembangunan nasional, baik buruknya peluang hidup masyarakat didasari dengan adanya kesempatan kerja yang nantinya setiap masyarakat akan memperoleh pendapatan dan pemenuhan kebutuhan hidup sehingga kesejahteraannya pun akan meningkat.

Setiap tahunnya masyarakat Indonesia selalu melahirkan para lulusan sarjana yang pastinya mayoritas berorientasi untuk langsung mendapatkan pekerjaan, atau para tamatan sekolah menengah atas dan setara yang setidaknya ingin memilih langsung bekerja ketimbang melanjutkan studinya, realitas seperti

ini bukan suatu masalah sederhana, karena melalui faktor inilah angka angkatan kerja akan semakin bertambah, dan idealnya peluang lapangan pekerjaan harus mampu menjawab kebutuhan tersebut, terlebih lagi siklus perusahaan dengan sistem PHK (Pemutusan Hak Kerja) tidak dapat ditampik keberadaannya, dan sudah dipastikan bahwa kondisi ini dapat mempengaruhi siklus pencarian dan persaingan kerja yang terjadi.

Tentunya dibalik semua itu terdapat beberapa hal yang patut untuk digaris bawahi yakni masalah kesiapan kemampuan, pendidikan, pengetahuan dan mental masyarakat dalam memasuki dunia kerja, karena tidak dapat dipungkiri tidak sedikit para calon angkatan kerja yang tidak memiliki *skill* apa pun setelah mereka melakukan studi, tentu hal ini menjadi masalah bagi masyarakat terkait daya saing dalam mendapatkan pekerjaan. Atau pada kondisi lain tingginya ekspektasi para calon pekerja terkait dimana tempat mereka kerja, jumlah gaji yang tidak sesuai harapan, serta pertimbangan-pertimbangan lain yang tidak diimbangi dengan kemampuan yang mempuni merupakan salah satu penyebab pengangguran di kawasan Cikarang, atau umumnya di Indonesia.

Pada konteks peneltian ini, peneliti melihat adanya keterkaitan visi dan program yang tengah dijalankan pemerintah daerah, tentunya untuk menanggulangi masalah pengentasan pengangguran, pada konteks pemerintahan daerah kabupaten Bekasi. Terdapat enam Program Prioritas Utama di Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Pemerintahan Kabupaten Bekasi yang diantaranya:

1. Pengentasan Kemiskinan,
2. Penanganan Stunting,

3. Pengentasan Pengangguran,
4. Pengendalian Inflasi,
5. Peningkatan Investasi,
6. Digitalisasi

Keseluruhan program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi ini, tentunya merujuk pada arahan presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo yang menginginkan perkembangan dan kemajuan dari segala sisi pembangunan yang mengacu pada ranah kesehatan, kesejahteraan dan perekonomian.

Merujuk pada program prioritas nomor tiga, yang notabene peneliti pilih sebagai objek penelitian ini, pengentasan yang dimaksud adalah bagaimana pemerintah daerah melakukan proses atau cara dalam menangani permasalahan pengangguran, yang kedepannya mampu memberikan kehidupan dan pendapatan yang layak pada masyarakat lokal serta mampu bersinergi membangun pembangunan ekonomi nasional. Sedangkan pengangguran merupakan orang yang tidak bekerja sama sekali, atau sedang dalam proses pencarian pekerjaan.

Permasalahan pengangguran memang menjadi masalah pelik di kota-kota besar, dan akan sangat terkesan aneh jika banyaknya pabrik-pabrik beroperasi tetapi masyarakat sekitar tidak diberi kesempatan kerja oleh perusahaan-perusahaan tersebut, ini menjadi masalah ekosistem yang terpendak dan perlu diatasi, khususnya oleh Dinas Ketenagakerjaan.

Berangkat dari pengangguran juga lah, pada faktanya dapat berdampak pada permasalahan-permasalahan seperti meningkatnya angka kemiskinan, memicu tindakan kriminalitas dan tindakan penyimpangan lainnya, menjadi beban hidup

bagi diri sendiri atau pun keluarga, serta keterampilan dapat menurun karena tidak lama digunakan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memperbarui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan perubahan atas kekuasaan yang tidak lagi berpusat hanya di pemerintah pusat, tetapi terjadi perubahan terkait hak dan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar mampu melaksanakan dan mengatur urusan pemerintahan dalam kerangka NKRI menurut asas otonomi daerah.

Pada hakekatnya undang-undang ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, peningkatan ekonomi, kekayaan sosial budaya dan kekhasan suatu daerah, dan peran serta masyarakat dengan memegang prinsip demokrasi yang adil, agar proses dan perkembangan pembangunan daerah tetap selaras dan bersinergi dengan pembangunan nasional itu sendiri.

Pada praktiknya setiap pemerintah daerah harus mampu meningkatkan beragam sektor kehidupan yang dirasa masih kurang dan perlu untuk terus dikembangkan pada daerah tersebut, contohnya seperti kualitas sumber daya manusia, agar dapat menjadi masyarakat yang potensial dan memiliki daya saing yang bagus dengan tenaga kerja luar dalam dunia pekerjaan. Atau menyediakan lapangan pekerjaan hingga peluang usaha bagi masyarakat sebagai upaya peningkatan pendapatan hidup masyarakat.

Semua konteks ini merupakan tergolong pada aspek ekonomi dan sudah sepatutnya diperhatikan oleh pemerintah daerah maupun pusat terkait peluang-peluang dan potensi daerah. sehingga daerah tersebut dapat mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tapi, dalam merealisasikannya tentunya tidak sesederhana mengidentifikasi masalah yang terjadi di masyarakat, melainkan setelahnya dibutuhkan daya analisis, perencanaan dan pelaksanaan dari rangkaian strategi yang diterapkan.

Setiap lembaga pemerintah harus memiliki strategi yang tepat agar mampu merealisasikan tujuan dari program Pengentasan Pengangguran, hakikatnya pemerintah harus memiliki perencanaan yang memiliki tujuan untuk dicapai. Tak hanya mencapai tujuan, strategi yang dilakukan juga harus menunjukkan bagaimana taktik dan cara yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut.

Strategi merupakan rencana awal yang didalamnya terdapat perencanaan serta perancangan yang akan dicapai kelak, di dalam strategi terdapat skema yang menjadi alat dalam menggapai tujuan yang dimaksud. Tentu saja aspek-aspek yang menyangkut tujuan seperti operasional, finansial dan aspek sosial lainnya direncanakan sedemikian matang demi keunggulan yang menjadi tujuan jangka panjang. Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pemerintahan daerah, keberadaan Pemkab Bekasi harus memastikan bahwa pemerintahan harus selalu menjawab permasalahan dan tantangan zaman, tentu untuk menjawab semua itu diperlukan strategi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bersinergi dengan tujuan negara.

Meski pun berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota 2023 yang peneliti dapat dari sumber Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi secara tingkat pengangguran berada di peringkat 5 kota/kabupaten dengan angka 8,87 % dari total 27 daerah. Menurut peneliti ini menunjukkan angka yang besar sebagai daerah dengan banyaknya pabrik beroperasi yang tentu menjadi pertanyaan besar apakah realitasnya mampu menyerap angka pengangguran atau tidak sama sekali.

Tabel 1. 1
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota (Persen), 2021-2023

Wilayah Jawa Barat	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota (Persen)		
	2021	2022	2023
Kota Cimahi	13,07	10,77	10,52
Kuningan	11,68	9,61	9,49
Kota Bogor	11,79	10,78	9,39
Karawang	11,83	9,67	8,95
Bekasi	10,09	10,31	8,87
Kota Bandung	11,46	9,55	8,83
Kota Sukabumi	10,78	8,63	8,53
Bogor	12,22	10,64	8,47
Bandung Barat	11,65	9,63	8,11
Kota Bekasi	10,88	9,61	7,90
Purwakarta	10,76	8,75	7,72
Cianjur	9,32	8,41	7,71
Kota Cirebon	10,53	8,42	7,66
Cirebon	10,38	8,11	7,65
Subang	9,77	7,77	7,65
Provinsi Jawa Barat	9,82	8,31	7,44
Garut	8,68	7,60	7,33
Sukabumi	9,51	7,77	7,32
Kota Depok	9,76	7,82	6,97
Sumedang	9,18	7,72	6,94
Kota Tasikmalaya	7,66	6,62	6,55
Bandung	8,32	6,98	6,52
Indramayu	8,30	6,49	6,46
Kota Banjar	6,09	5,53	5,43
Majalengka	5,71	4,16	4,12
Tasikmalaya	6,16	4,17	3,89
Ciamis	5,06	3,75	3,52
Pangandaran	3,25	1,56	1,52

Catatan: Sakernas Agustus 2018-2021 menggunakan penimbang hasil SUPAS 2015. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
Sumber: Sakernas Agustus 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat 2021-2023

Tentu ini memerlukan perhatian yang lebih serius dari pemerintah daerah mau pun pusat, maka wajar saja jika pemerintah mencanangkan program pengentasan pengangguran sebagai program prioritas.

Merujuk pada masalah dan fenomena yang peneliti identifikasi diatas, peneliti memilih Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi terkait strategi atau upaya yang dilakukan dalam melaksanakan pengentasan pengangguran, yang notabene menjadi salah satu dari enam program prioritas Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Sebagai bahan prefrensi atau rujukan penelitian yang serupa dan memiliki arahan penelitian atau subjek dan objek penelitian yang sama, berikut peneliti lampirkan beberapa penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai bahan rujukan penelitian.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Albert Januar Christian (2020) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Komputer Indonesia dengan judul “Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Guna Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Yang Terdampak Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19)”. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, menunjukan bahwa strategi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung guna penguatan UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 pada komponen Purposes, Environments Directions, Actions, dan Learnings sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih terdapat beberapa hal yang belum maksimal dalam implementasinya. Namun, dengan strategi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dapat berdampak bagi para pelaku UMKM dengan menguatnya usaha para pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.

Kedua, penelitian dari Tegar Anugrah Ramadhan (2023) Ilmu Pemerintahan dari Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, dengan judul “Pemanfaatan Media Sosial Instagram Impelementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Pengangguran Dan Kemiskinan Di Kota Tangerang Selatan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada akun Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Implementasi Kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan di kota tangeragn selatan ini masih banyaknya keluhan dari masyarakat dan belum optimal dikarenakan masih terdapat keluhan yang dirasakan oleh masyarakat.

Ketiga, penelitian dari Bayu Prasetyo Mariono, Michael Mantiri, Frans Singkoh (2017), Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sam Ratulangi dengan judul “Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Menanggulangi Angka Pengangguran Di Kabupaten Minahasa”. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa penanggulangan pengangguran oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa khususnya Dinas Tenaga Kerja sudah baik berdasarkan penelitian di Dinas Tenaga Kerja maupun kepada masyarakat, walaupun dilihat dari data BPS bahwa tingkat pertumbuhan pengangguran di Kabupaten Minahasa setiap tahun mengalami peningkatan dimana tahun 2014 sebanyak 13.584 dan tahun 2015 sebanyak 14.513. Ini merupakan pekerjaan rumah yang sangat penting bagi Dinas Tenaga Kerja karena pada dasarnya peningkatan pengangguran ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Minahasa.

Selanjutnya, yakni penelitian dari Khusna Nadzif (2023) Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Universitas Tidar, dengan judul “Manajemen Strategi Dinas

Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang Dalam Mengurangi Pengangguran”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen strategi di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang sudah berjalan cukup baik; aspek pengamatan lingkungan didukung stakeholders, peraturan pemerintah, sumber daya manusia dan sarana prasarana, struktur birokrasi dan budaya organisasi, sedangkan kelemahannya pada sumber daya keuangan dan luasnya wilayah; aspek perumusan strategi berpedoman terhadap visi dan misi Bupati Magelang serta RPJMD; aspek pelaksanaan strategi berjalan dengan baik, adapun kendalanya pada ketidakcocokan lowongan kerja dengan minat masyarakat, monitoring, serta kurangnya anggaran; dari aspek evaluasi dan pengawasan dilakukan baik dan tidak menerapkan reward and punishment. Untuk faktor pendukung dan penghambatnya, yakni; aspek komunikasi strategi, informasi tersampaikan tetapi respon masyarakat kurang; aspek kepemimpinan organisasi belum menghasilkan alternatif inovasi sedangkan pemberian motivasi berjalan dengan baik.

Terakhir adalah Penelitian dari Rizkia Yolanda Supriadi. 2020. Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Komputer Indonesia, dengan judul “Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini dilihat dari indikator tujuan, lingkungan, pengarahannya, tindakan, pembelajaran sudah cukup baik tetapi belum optimal. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta meningkatkan setiap tahunnya, meskipun belum dikatakan optimal.

Dari kelima penelitian terdahulu diatas, semua metodologi penelitian yakni menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang mana metode ini pun akan digunakan oleh peneliti pada skripsi ini.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan di bagian ini, peneliti mengangkat judul penelitian yang berjudul “**Strategi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Dalam Pelaksanaan Program Prioritas Pengentasan Pengangguran Di Kawasan Cikarang.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti menerapkan gagasan berpikir Geoff Mulganterkait strategi pemerintahan, dan merumuskan masalah peneliti yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana **Tujuan** Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Dalam Strategi Pelaksanaan Program Prioritas Pengentasan Pengangguran di Kawasan Cikarang
2. Bagaimana **Lingkungan** Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Dalam Strategi Pelaksanaan Program Prioritas Pengentasan Pengangguran di Kawasan Cikarang
3. Bagaimana **Pengarahan** Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Dalam Strategi Pelaksanaan Program Prioritas Pengentasan Pengangguran di Kawasan Cikarang

4. Bagaimana **Tindakan** Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Dalam Strategi Pelaksanaan Program Prioritas Pengentasan Pengangguran di Kawasan Cikarang.
5. Bagaimana **Pembelaran** Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Dalam Strategi Pelaksanaan Program Prioritas Pengentasan Pengangguran di Kawasan Cikarang.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengkaji, meneliti, menganalisa, dan menjelaskan mengenai Strategi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Dalam Pelaksanaan Program Prioritas Pengentasan Pengangguran.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana **Tujuan** Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Dalam Strategi Pelaksanaan Program Prioritas Pengentasan Pengangguran di Kawasan Cikarang
2. Untuk mengetahui bagaimana **Lingkungan** Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Dalam Strategi Pelaksanaan Program Prioritas Pengentasan Pengangguran di Kawasan Cikarang
3. Untuk mengetahui bagaimana **Pengarahan** Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Dalam Strategi Pelaksanaan Program Prioritas Pengentasan Pengangguran di Kawasan Cikarang

4. Untuk mengetahui bagaimana **Tindakan** Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Dalam Strategi Pelaksanaan Program Prioritas Pengentasan Pengangguran di Kawasan Cikarang
5. Untuk mengetahui **Pembelajaran** Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Dalam Strategi Pelaksanaan Program Prioritas Pengentasan Pengangguran di Kawasan Cikarang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang telah dirumuskan oleh peneliti mengenai Strategi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Dalam Pelaksanaan Program Prioritas Pengentasan Pengangguran.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau sumbangsih dalam pengembangan ilmu pemerintahan dan dapat menambah keilmuan dibidang kajian ilmu pemerintahan, khususnya pada konteks pengelolaan program pemerintah daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memiliki kegunaan bagi berbagai pihak. Berikut adalah kegunaan praktis yang telah peneliti rumuskan :

1. Bagi Peneliti

Sebagai aplikasi keilmuan bagi peneliti yang selama studi sudah diterima secara pemahaman teori, serta sebagai penambah pengetahuan dan wawasan dalam konteks strategi pemerintahan.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa Universitas Komputer Indonesia secara umum, dan khususnya program studi Ilmu Pemerintahan sebagai literatur bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dalam bidang kajian yang sama.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan evaluasi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi terkait penerapan strategi pada pelaksanaan program prioritas Pengentasan Pengangguran.

4. Bagi Masyarakat Cikarang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan informasi yang layak bagi masyarakat Cikarang terkait probematika pengangguran dan solusi-solusi yang dilakukan pemerintah atas masalah tersebut.